

BAB IV

PERAN HUMAN RIGHTS WATCH DALAM MENANGANI KRISIS ROHINGYA DI MYANMAR

Sebagai organisasi non-Pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan, tentunya Human Rights Watch ikut turun tangan dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Peran serta dari beberapa pihak seperti Human Rights Watch sangat diperlukan untuk menangani krisis kemanusiaan tersebut. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai peran-peran apa saja yang dijalankan oleh organisasi Human Rights Watch dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar serta hambatan apa saja yang mereka hadapi dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tersebut.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar sepertinya sedang menjadi sorotan dunia. Krisis tersebut bukan hanya menjadi masalah bagi Negara Myanmar melainkan menjadi masalah pula bagi Negara-negara di seluruh dunia. Banyak Negara dan organisasi internasional yang ikut turun tangan dalam membantu mengatasi krisis tersebut. Salah satu organisasi yang memiliki peran untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar adalah Human Rights Watch. Human Rights Watch merupakan organisasi internasional yang bekerja di bidang kemanusiaan. Melihat dan mendengar adanya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar tentunya membuat human rights watch merasa perlu turun tangan dalam upaya mengatasi krisis tersebut. Human Rights Watch (HRW) itu sendiri memiliki peran-peran antara lain sebagai:

A. Peran Mikro

Di dalam peran mikro ini, Human Rights Watch melakukan berbagai macam peran yang tergolong sederhana di dalam upayanya untuk membantu para korban krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Peran-peran tersebut antara lain adalah dengan cara memastikan setiap bantuan yang meliputi obat-obatan, makanan, minuman, serta segala kebutuhan lainnya sampai kepada etnis Rohingya. Human Rights Watch bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai macam

organisasi lainnya seperti ASEAN menekan pemerintah Burma agar mengizinkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang diberikan tersebut sampai dan diterima oleh para korban yang berada di wilayah Myanmar. HRW dan organisasi-organisasi lainnya berhasil menyerahkan bantuan-bantuan tersebut kepada Rohingya pada tanggal 14 oktober 2017. Acara penyerahan bantuan ini turut dihadiri oleh para Duta Besar negara anggota ASEAN dan pejabat yang mewakili. Bantuan tersebut berasal dari negara-negara ASEAN. Bantuan-bantuan tersebut meliputi tenda, peralatan untuk keluarga, perlengkapan kebersihan pribadi, peralatan dapur, generator listrik, peralatan listrik, perahu aluminium bermesin, dan peralatan pencahayaan yang dilengkapi generator, sarana air bersih dan lain sebagainya (Nursya'bani, Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Rohingya Tiba di Myanmar, 2017). Human Rights Watch juga harus memastikan bahwasanya bantuan-bantuan tersebut juga bisa menjangkau lebih dari 270.000 pengungsi Rohingya dan pengungsi lainnya yang berada di Bangladesh (Human Rights Watch, 2017).

Selain itu, Human Rights juga melakukan pendekatan terhadap korban-korban dari kejahatan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar tersebut. Human Rights Watch melakukan pendekatan kepada para korban agar para korban nantinya akan terbuka dan mau untuk berkomunikasi serta menceritakan apa yang sebenarnya sedang mereka alami saat ini. Human Rights Watch disini berperan sebagai wadah bagi para korban untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mengerikan yang diterima oleh mereka. Karena banyak dari korban yang merasa takut untuk menceritakan apa yang sebenarnya sedang mereka alami, oleh karenanya disini Human Rights Watch melakukan pendekatan kepada para korban agar mereka mempunyai tempat untuk menceritakan masalah yang sedang mereka alami (Human Rights Watch, 2016) .

Di dalam peran ini Human Rights Watch berhasil memastikan bantuan kepada para korban yang ada di Myanmar, Human Rights Watch juga berhasil melakukan pendekatan kepada para korban sehingga HRW mendapat banyak sekali

informasi-informasi terkait dengan kasus di Myanmar tersebut dari para korban (Human Rights Watch, 2016).

B. Peran Makro

Di dalam peran makro ini Human Rights Watch memiliki beberapa peran penting di dalam upayanya menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Peran-peran tersebut tergolong peran-peran yang cukup besar dan berpengaruh bagi masyarakat Rohingya. Peran-peran tersebut antara lain:

1. Menyediakan informasi-informasi penting terkait kasus di Myanmar

Informasi merupakan hal yang sangat penting di dalam upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang terjadi, terutama di dalam kasus krisis kemanusiaan di Myanmar ini. Karena dengan Informasi Human Rights Watch tidak hanya memberikan fakta-fakta, tetapi juga kesaksian cerita sehingga aktivis dapat membujuk orang dan mendorong publik untuk mengambil tindakan. Dalam mengidentifikasi sebuah isu, membutuhkan pesan yang kuat, jelas dan biasanya memiliki dampak terhadap sebuah kebijakan.

Media merupakan salah satu mitra penting dalam menyebarluaskan informasi. Media diperlukan untuk menarik perhatian pers lebih luas. Dengan media, informasi dapat disampaikan dengan tepat waktu dan dramatis. Selain itu, media bisa menafsirkan fakta dan kesaksian sehingga tujuan untuk membujuk orang dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan dapat terwujud (Firmansyah, 2017).

Di dalam perannya sebagai penyedia informasi, Human Rights Watch mencoba dengan cepat melakukan penelitian secara mendalam terhadap isu-isu serta kondisi terkini yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Human Rights Watch di dalam peran ini melakukan penelitian dan wawancara yang sangat mendalam terhadap para korban. Ketika Human Rights Watch telah memperoleh informasi tersebut harus menguji kebenaran dari informasi yang mereka dapatkan. Mereka biasanya mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada setiap korban agar Human Rights Watch dapat mengidentifikasi mengenai akurat atau tidaknya pernyataan mereka. Human Rights Watch tidak hanya mencari informasi dari satu sumber saja, melainkan dari beberapa sumber. Human Rights Watch juga tidak hanya memakai teknik wawancara saja di dalam memperoleh informasinya, mereka biasanya juga memasang citra satelit di sekitar lokasi kejadian (Human Rights Watch, n.d.).

Ada berbagai macam informasi yang berhasil diperoleh oleh Human Rights Watch di dalam kasus yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar tersebut. Pertama, HRW memberikan data bahwasanya aksi militer Pemerintah Myanmar di Rakhine membawa dampak negatif bagi kemanusiaan. Lebih dari 100.000 orang yang tinggal di Rakhine melarikan diri dari daerah tersebut dan ratusan rumah serta bangunan mengalami kerusakan akibat kekerasan yang dilakukan oleh etnis Rakhine (Anugerah, 2017). Kedua, HRW menyampaikan laporan yang berisikan pemberitahuan mengenai keadaan, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan dan lain sebagainya yang dialami oleh rakyat (Susetyo, 2013).

Ketiga, HRW memberikan informasi-informasi penting. Informasi-informasi tersebut antara lain adalah mengenai adanya sekitar 8000 orang yang masih berada di atas kapal di tengah lautan dan tidak memiliki serta tidak dibekali oleh cukup makanan dan minuman. Serta banyak dari mereka yang sakit keras (Watch, Rappler Talk: Human Rights Watch on Duterte and Rohingya, 2015). Yang keempat, HRW menginformasikan bahwasanya ada sekitar 150 ribu orang berada di pengungsian yang tidak layak dan memadai. Di dalam penampungan tersebut pula tidak tersedia makanan dan minuman yang cukup serta akses air bersih dan obat-obatan juga terbatas. Lingkungan penampungan juga tidak mendukung untuk mengedukasi anak-anak mereka. Para pengungsi Myanmar terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan tinggal dalam

keadaan yang memperhatikan di tempat pengungsian dikarenakan keadaan di tempat tinggal mereka yang tidak aman dan sangat berbahaya sehingga mereka memilih untuk berada di tempat pengungsian serta bepergian melalui jalur laut.

Kelima, HRW menampilkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwasanya sekitar 288 desa yang merupakan tempat tinggal dari masyarakat minoritas muslim telah dibakar dan lebih dari setengah juta masyarakat Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar. HRW juga menginformasikan bahwasanya kekerasan dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya masih terus berlangsung (Robertson, 2017).

Keenam, PBB, Human Rights Watch, dan lainnya telah mendokumentasikan banyak pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan oleh pasukan keamanan Burma terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine setelah serangan 9 Oktober 2016 di tiga pos terdepan polisi. Human Rights Watch mendokumentasikan pembunuhan di luar proses hukum, pemerkosaan perempuan dan anak perempuan, dan pembakaran sedikitnya 1.500 struktur. Kekerasan itu menyebabkan pemindahan besar-besaran, dengan lebih dari 70.000 orang melarikan diri ke Bangladesh dan lebih dari 20.000 orang mengungsi sementara.

Ketujuh, Human Rights Watch menerbitkan laporan yang terdiri dari 20 halaman laporan tersebut berisikan temuan mereka yang diperoleh dari 847 wawancara, citra satelit, dokumen yang diautentikasi, foto, dan video, dan mencakup pelanggaran serius di Rakhine, Shan, dan Kachin States dari 2011 hingga saat ini. Selain kejahatan yang didokumentasikan di Negara Bagian Rakhine, Misi Pencarian Fakta menemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Myanmar di Negara Bagian Shan dan Kachin. Ini juga merinci pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok

bersenjata etnis yang dikatakannya mungkin juga merupakan kejahatan perang. Laporan Human Rights Watch tersebut juga menyimpulkan bahwa pelanggaran ini mencerminkan pola perilaku yang sudah lama dilakukan oleh otoritas militer Myanmar dan kebutuhan untuk mengakhiri siklus kekebalan hukum (HRW, 2018).

Di dalam peran ini, informasi-informasi yang telah diberikan oleh Human Rights Watch dalam bentuk laporan-laporan yang mereka terbitkan rupanya sangat membantu banyak sekali aktivis-aktivis serta media di dalam menyampaikan berita-berita terkait dengan krisis Rohingya. Banyak dari media maupun aktivis yang mengacu pada Human Rights Watch dalam memberitakan kondisi terkini dari etnis Rohingya di Myanmar, hal ini dikarenakan informasi-informasi yang diberikan oleh Human Rights Watch dinilai sangat akurat dan pihak Human Rights Watch itu sendiri selalu memberikan informasi-informasi yang terbaru mengenai kondisi Rohingya. Dalam peran ini tentunya memberi dampak berupa dukungan yang diberikan oleh berbagai Negara dan aktivis yang menjadi turut serta membela dan mendesak pihak Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik tersebut, dukungan tersebut di dapat dibantu dengan peran media pula.

Selain itu, informasi-informasi yang dilaporkan oleh Human Rights Watch telah menjadi bukti telah terjadinya kasus di Myanmar tersebut. Hal itu dibuktikan dengan penyangkalan yang dilakukan oleh militer Myanmar bahwasanya pihak militer tidak pernah melakukan kekerasan-kekerasan yang selama ini telah diberitakan oleh media. Namun, pengelakan tersebut tidak diakui oleh banyak Negara karena HRW telah menyerahkan sejumlah bukti-bukti berupa informasi maupun gambar-gambar serta rekaman yang menunjukkan tindakan penindasan, kekerasan, pelecehan seksual, perbudakan, serta pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Myanmar (Human Rights Watch, 2017)

2. Mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia untuk berempati terhadap kasus Rohingya

Sebagai organisasi yang memiliki peran untuk mempengaruhi masyarakat yang ada di seluruh dunia, Human Rights Watch mempublikasikan bukti-bukti genosida atas muslim Rohingya di Myanmar yang terjadi sejak tahun lalu. Menurut dua laporan terpisah, bukti-bukti itu menunjukkan pasukan keamanan Myanmar menggorok leher warga muslim Rohingya, membakar korban hidup-hidup, dan memperkosa para perempuan dan anak-anak perempuan. Laporan Human Rights Watch tersebut berpusat pada kekerasan seksual yang dilakukan militer untuk melawan Rohingya. Mereka menyimpulkan tindakan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu Human Rights Watch juga mempublikasikan gambar-gambar mengenai situasi yang sedang terjadi di Myanmar. Gambar-gambar tersebut di publikasikan oleh Human Rights Watch di website resmi mereka serta di google. Salah satu contoh gambar-gambar tersebut adalah sebagai berikut:

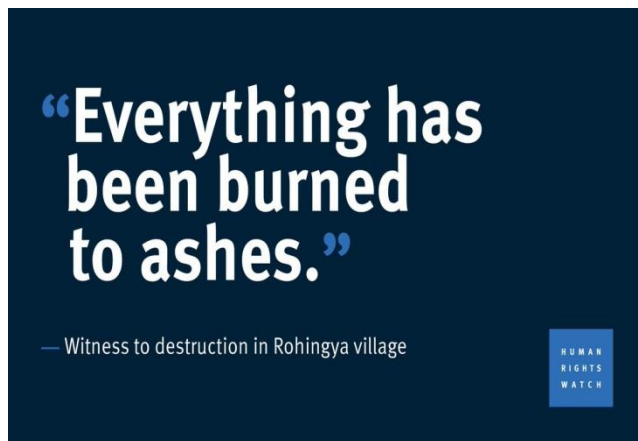


Gambar 4. 1 Pengungsi Rohingya

Sumber: <https://www.hrw.org>

Human Rights Watch menampilkan foto yang menggambarkan kondisi rakyat Rohingya. Puluhan bahkan ratusan ribu warga Rohingya berusaha melarikan diri dari tempat tinggalnya secara bergantian melalui jalur darat maupun laut. Mereka melarikan diri dan memilih mengungsi ke wilayah lain yang lebih aman dikarenakan aksi kekerasan dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh militer Myanmar. Mereka memilih untuk mengungsi agar terhindar dari penganiayaan, termasuk ancaman terhadap hidup mereka, kekerasan fisik, penghancuran rumah mereka, dan pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya (Human Rights Watch, 2017). Mereka melarikan diri ke Negara-negara yang terdekat dengan Myanmar seperti Bangladesh. Mereka membawa perbekalan berupa makanan, minuman, serta pakaian yang seadanya.

Human Rights Watch sering sekali membuat kutipan-kutipan serta karikatur terkait dengan krisis kemanusiaan yang melanda etnis Rohingya. Misalnya saja seperti yang di bawah ini:



Gambar 4. 2 Kutipan Human Rights Watch terkait Krisis Rohingya

Sumber: <https://www.hrw.org>



Gambar 4. 3 *Karikatur Terkait Isu Rohingya*
<https://twitter.com/Reaproy>

Kutipan serta karikatur tersebut kemudian oleh Human Rights Watch di unggah ke media sosial mereka seperti twitter dan facebook resmi Human Rights Watch agar diketahui oleh orang di seluruh dunia serta agar mendapat respon dan dukungan dari orang-orang di seluruh dunia sehingga orang-orang tersebut dapat membantu Human Rights Watch dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang menimpa Rohingya di Myanmar tersebut.

Banyak dari masyarakat dunia setelah melihat kutipan dan gambar-gambar yang telah di unggah HRW ke media sosial tersebut ikut memberikan tanggapan mereka dalam kasus Rohingya tersebut. Banyak dari mereka yang memberikan dukungan terhadap etnis Rohingya dan turut melakukan demonstrasi di beberapa Negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Ratusan perempuan melakukan aksi demo di depan kedubes Myanmar di Indonesia sebagai bentuk solidaritas sesama saudara muslim. Mereka

menyuarakan bahwasanya etnis Rohingya juga merupakan manusia yang memiliki hak untuk hidup damai dan merdeka. Oleh karena itu, perlakuan buruk dan kekerasan hingga pembantaian yang dilakukan oleh rezim militer dan masyarakat sipil itu sebagai tindakan penghapusan hak manusia (Sutari, 2017).

Selain masyarakat, beberapa pemerintah atau petinggi dari beberapa Negara juga menanggapi kasus yang sedang berlangsung di Myanmar tersebut. Banyak dari petinggi Negara seperti Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia hadir di Myanmar untuk menyampaikan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Menteri Luar negeri Indonesia juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Myanmar dapat segera dihentikan dan diselesaikan agar tidak banyak memakan semakin banyak korban jiwa (DW, 2017).

Selain Negara Indonesia, Negara Thailand juga turut memberi tanggapan di dalam kasus Rohingya ini. Pemerintah Kerajaan Thailand selalu menaruh perhatian besar untuk memberikan perawatan dan perlindungan kepada orang-orang Rohingya. Pemerintah Thailand menyatakan, sepenuhnya mendukung sikap ASEAN yang mengecam kekerasan terhadap warga Rohingya (Vinanda, 2017)

3. Bekerjasama dengan organisasi lain untuk menekan aktor-aktor penting agar merubah kebijakan mereka

Di dalam menjalankan perannya ini, Human rights Watch memiliki tujuan untuk merubah suatu kebijakan. Untuk melakukan perubahan kebijakan tersebut tentunya Human Rights Watch perlu untuk memberi pengaruh serta menekan aktor-aktor penting dan yang berpengaruh seperti pemerintah, bank dunia, maupun perusahaan transnasional (Keck & Sikkink, 1998).

Di dalam hal ini HRW bersama beberapa organisasi lain telah mengirim surat yang ditujukan kepada United

Nation High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) berkaitan dengan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine. Surat tersebut dikirim untuk Permanent Representatives of Member and Observer States of the United Nations Human Rights Council. HRW dan organisasi lainnya telah menulis surat guna mendesak delegasi untuk mendukung panggilan oleh Komisaris Tinggi PBB dalam bidang HAM dan memperbarui mandat Pelapor Khusus dalam hal pembentukan oleh Dewan HAM PBB. Adapun maksud ditulisnya surat tersebut adalah dengan tujuan mendesak Dewan HAM untuk membentuk penyelidikan internasional independen atas berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan di bagian Rakhine. Dalam hal tersebut HRW telah mendokumentasikan pelanggaran yang meluas yang kini tampak serius dihadapi oleh warga sipil Rohingya (Ula S. , 2017).

Selain itu Untuk membantu pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam menangani krisis pengungsi Rohingya, Human Rights Watch telah mengeluarkan Sepuluh prinsip untuk melindungi pengungsi dan orang-orang yang mengungsi dari luar negeri yang berasal dari krisis Rohingya di Burma. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa Rohingya yang melarikan diri dari Burma seharusnya dianggap sebagai pengungsi dan diterima di Negara tersebut untuk beberapa waktu. Banyak dari etnis Rohingya yang telah menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, bahkan kewarganegaraan etnis Rohingya dicabut sehingga mereka saat ini sudah tidak memiliki kewarganegaraan yang menyebabkan dipersulitnya dalam akses kesehatan, mata pencaharian, pendidikan, tempat tinggal dan lain sebagainya (Human Rights Watch, 2017).

Banyak pengungsi Rohingya telah mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka ingin pulang ke rumah tetapi tidak bisa karena keadaan di tempat tinggal mereka yang masih belum dinyatakan aman. Mereka baru akan bias kembali ke tempat tinggal mereka apabila Myanmar bersedia dan mampu memberikan kembali hak asasi manusia kepada

etnis Rohingya, serta diberikan kembali status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya agar menjamin keadilan dan keamanan bagi mereka (Human Rights Watch, 2017).

HRW juga melakukan pendesakan bersama dengan 95 organisasi non pemerintah lainnya terhadap negara-negara anggota PBB untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan bencana kemanusiaan yang melanda populasi etnis Rohingya di Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad al Hussein menggambarkan kampanye pasukan keamanan Myanmar yang sedang berlangsung melawan Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara sebagai pembersihan etnis. HRW bersama dengan 95 organisasi tersebut mengatakan bahwasanya semakin banyak bukti yang muncul maka semakin jelas pula bahwa kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan negara Myanmar adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka juga mengatakan bahwasanya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya perlu mengambil tindakan segera (Human Rights Watch, 2017).

Human Rights Watch bersama dengan 95 organisasi non pemerintah tersebut mendesak delegasi PBB, terutama dari 114 negara yang berkomitmen pada Accountability, Coherence and Transparency (ACT), yang membuat janji untuk mendukung "*timely and decisive action*" dengan tujuan untuk mencegah atau mengakhiri komisi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan perang. Mereka mendesak agar segera melakukan upaya untuk mengadopsi resolusi di Majelis Umum PBB yang menangani situasi tersebut, dan menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang akan dikenakan pada pemerintah Myanmar. Mereka mendesak PBB karena lebih dari 400.000 orang Rohingya telah melarikan diri dan melintasi perbatasan ke Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika pasukan keamanan Myanmar

melancarkan operasi sebagai tanggapan atas serangan terkoordinasi oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di Negara Bagian Rakhine. Operasi-operasi ini, yang melibatkan pembunuhan luas, peletakan ranjau darat, penjarahan, dan pembakaran yang menargetkan kaum Rohingya, telah mengakibatkan penghancuran massal lebih dari 200 desa, menurut citra satelit dan kesaksian saksi mata. Puluhan ribu orang dari etnis minoritas lainnya juga mengungsi akibat kekerasan itu. Pengecaman keras yang dilakukan oleh PBB dan para pemimpin dunia dianggap masih belum dapat mengakhiri kekejaman Myanmar (Human Rights Watch, 2017).

Selain itu, Human Rights Watch dan 95 organisasi non pemerintah lainnya juga mendesak anggota Dewan Keamanan untuk menambah tekanan pada otoritas Myanmar dengan serius mempertimbangkan pilihan seperti embargo senjata terhadap militer dan sanksi keuangan yang ditargetkan terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan dan pelanggaran serius. Semua negara anggota PBB yang terkait juga harus mempertimbangkan tindakan bilateral, multilateral, dan regional yang dapat mereka lakukan untuk memberikan tekanan tambahan pada pemerintah Myanmar. Secara khusus, mereka juga meminta semua negara untuk segera menanggungkan bantuan militer dan kerjasama dengan Myanmar. HRW dan 95 organisasi lainnya juga mengatakan bahwasanya apabila pemerintah, pejabat PBB dan diplomat hanya mengadakan pertemuan dan membuat pidato karena kekejaman berlanjut di Myanmar, maka mereka akan menanggung risiko gagal menggunakan setiap alat diplomatik yang mereka miliki untuk menghentikan kampanye pembersihan etnis dan kejahatan lebih lanjut terhadap kemanusiaan (Human Rights Watch, 2017).

Human Rights Watch dan Amnesty International juga mengecam dan menyesalkan kegagalan dewan keamanan PBB untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine barat tersebut. Menurut Human Rights

Watch, selain mengutuk kekerasan, dewan keamanan PBB seharusnya bisa mengadopsi resolusi yang mengancam sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan. Human Rights Watch menyesalkan dewan keamanan PBB yang tidak bias segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan konflik yang ada di Myanmar. Terbukti sejak pertemuan terakhir dewan keamanan dengan HRW di Myanmar, masih ada sekitar 310.000 orang Rohingya telah berusaha melarikan diri dari kekerasan dan dipaksa menjadi pengungsi, selain itu HRW juga menyampaikan bahwasanya masih ada beberapa Negara bagian Rakhine juga masih terbakar (First Post, 2017).

Selain itu, di dalam peran ini ini Human Rights Watch juga menjalin kerjasama dengan The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women atau yang sering dikenal dengan sebutan CEDAW. Pihak HRW menyambut baik tawaran untuk memberikan masukan serta saran kepada Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam upaya untuk menghentikan kekerasan yang sedang terjadi di Myanmar. Di dalam kerjasamanya ini, Human Rights Watch menyampaikan investigasi yang mereka lakukan sejak tahun 2016-2018 terkait dengan kasus kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh kaum perempuan di dalam kasus krisis kemanusiaan Rohingya (HRW, 2018).

Human Rights Watch Organisasi tentunya telah mendokumentasikan banyak kejahatan kekejaman massal - termasuk pembunuhan luas, penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, penangkapan yang sewenang-wenang, dan pembakaran massal - yang dilakukan oleh tentara Myanmar dan pasukan keamanan negara lainnya. Human Rights Watch telah menemukan bahwa kekejaman ini terhadap jumlah Rohingya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada bulan Desember 2016 dan Januari 2017, para peneliti Human Rights Watch di Bangladesh mewawancarai 18 wanita, di antaranya 11 telah selamat dari kekerasan seksual, serta 10 pria, semuanya telah

melarikan diri dari "operasi pembebasan" yang dipimpin militer di Rakhine State bagian utara pada akhir 2016 Secara keseluruhan. Human Rights Watch mendokumentasikan 28 insiden pemerkosaan dan serangan seksual lainnya. Pada bulan September dan Oktober 2017, Human Rights Watch mewawancarai 52 wanita dan gadis Rohingya, termasuk 29 korban perkosaan yang melarikan diri ke Bangladesh. Para korban perkosaan berasal dari 19 desa berbeda di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sebagian besar di kota-kota Buthidaung dan Maungdaw utara (HRW, 2018).

Human Rights Watch menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar memperkosa dan menyerang wanita dan anak perempuan secara seksual selama serangan besar di desa-desa setelah 25 Agustus 2017, serta pada minggu-minggu sebelum serangan besar ini, kadang-kadang setelah pelecehan berulang. Dalam setiap kasus yang dijelaskan kepada Human Rights Watch, para pelaku berseragam anggota pasukan keamanan, hampir semua personil militer. Korban-korban pemerkosaan tersebut menggambarkan situasi brutal yang mereka alami pada saat tragedi pemerkosaan tersebut. Mereka mengatakan kepada Human Rights Watch bahwasanya pemerkosaan tersebut adalah pemerkosaan geng, yang melibatkan dua atau lebih pelaku. Dalam delapan kasus, perempuan dan anak perempuan dilaporkan diperkosa oleh lima atau lebih tentara. Mereka menggambarkan diperkosa di rumah mereka dan saat melarikan diri dari desa yang terbakar. Human Rights Watch mendokumentasikan enam kasus pemerkosaan massal yang dilakukan oleh militer Myanmar, termasuk di desa Tula Toli, yang secara resmi dikenal sebagai Min Gyi, di kota Maungdaw. Dalam contoh ini, orang yang selamat mengatakan bahwa tentara mengumpulkan mereka bersama dalam kelompok dan kemudian geng memperkosa mereka. Pemerkosaan itu disertai dengan tindak kekerasan, penghinaan, dan kekejaman lebih lanjut (HRW, 2018).

Pasukan keamanan memukuli wanita dan gadis dengan tinju atau senjata, menampar mereka, atau menendang mereka dengan sepatu bot. Dalam dua kasus, perempuan melaporkan bahwa penyerang mereka menertawakan mereka selama pemerkosaan geng, dan penyerang lebih sering mengancam korban mereka baik secara lisan atau melalui tindakan seperti meletakkan pistol ke kepala mereka. Beberapa penyerang juga memukuli anak-anak perempuan selama serangan. Membentengi Hak-hak yang terdokumentasi contoh-contoh tentara yang membunuh wanita Rohingya dan memutilasi tubuh mereka setelah memperkosa mereka, termasuk memotong payudara dan memotong vagina dan perut dengan pisau panjang (HRW, 2018).

Para korban pemerkosaan berbicara tentang menahan berbagai pelanggaran sekaligus. Selain diperkosa dengan geng, tiga wanita digambarkan dengan sangat sedih melihat pasukan keamanan membunuh anak-anak mereka yang masih kecil. Wanita dan gadis lain mengatakan bahwa mereka menyaksikan pembunuhan orang tua mereka yang lanjut usia, suami mereka, anggota keluarga lainnya, dan tetangga. Banyak yang melaporkan menyaksikan kekejaman terhadap mereka yang sangat rentan, seperti seorang tentara yang membunuh seorang gadis berusia 5 tahun yang tidak bisa mengikuti keluarga yang melarikan diri, atau pasukan keamanan mendorong orang tua yang tidak dapat melarikan diri kembali ke rumah yang terbakar. Tak satu pun dari korban perkosaan yang diwawancarai oleh Human Rights Watch atau Fortify Rights menerima perawatan pasca perkosaan di Myanmar. Mereka yang selamat tidak menerima intervensi darurat yang harus dilakukan dalam beberapa hari setelah perkosaan, seperti kontrasepsi darurat (dalam 120 jam) atau profilaksis terhadap infeksi HIV (dalam 72 jam). Pemerintah Myanmar terus menghalangi akses kemanusiaan ke banyak Negara Bagian Rakhine.

CEDAW meminta Human Rights Watch bekerja sama dengan mereka untuk memberikan masukan kepada pihak

CEDAW dalam upaya mereka untuk menekan pemerintah agar segera menyelesaikan kasus kekerasan yang sedang terjadi di Myanmar tersebut. Human Rights Watch bersama CEDAW melakukan penekanan terhadap pemerintah Myanmar dalam hal: (HRW, 2018)

- a. Pastikan akses tanpa hambatan untuk organisasi bantuan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, termasuk organisasi yang membantu korban kekerasan seksual dan memberikan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi.
- b. Pastikan akses tanpa gangguan untuk wartawan dan pemantau hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine.
- c. Bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan internasional terhadap dugaan kejahatan di Negara Bagian Rakhine, termasuk Misi Pencarian Fakta PBB yang didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia.
- d. Mematuhi Pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB November, yang menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk "menerapkan langkah-langkah sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 2106 (2013) untuk mencegah dan menanggapi insiden kekerasan seksual dan ... bekerja dengan Perwakilan Khusus tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik. "
- e. Segera mencabut semua undang-undang yang diskriminatif, peraturan, dan perintah lokal dan menghentikan praktik yang membatasi perkawinan, pergerakan, kelahiran, dan mata pencaharian Rohingya. Berkomunikasi dengan pemerintah pusat, negara bagian, dan lokal dan masyarakat umum bahwa pihak berwenang yang terkait harus segera menghentikan semua praktik resmi dan tidak resmi terkait dengan pembatasan diskriminatif terhadap Rohingya.
- f. Mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 untuk mengakhiri ketentuan diskriminatif terhadap Rohingya dan mengurangi status tanpa kewarganegaraan

dengan memberikan Rohingya akses yang sama terhadap hak kewarganegaraan.

- 1) Sesuai dengan larangan universal diskriminasi rasial, amandemen UU Kewarganegaraan 1982 untuk menggunakan kriteria obyektif untuk menentukan kewarganegaraan, seperti keturunan, di mana kewarganegaraan dilewatkan melalui satu orang tua yang merupakan warga negara atau penduduk tetap.
 - 2) Merevisi Undang-undang Kewarganegaraan sesuai dengan pasal 7 Konvensi Hak Anak untuk memastikan bahwa anak-anak Rohingya memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan apabila mereka tidak memiliki kewarganegaraan karena mereka tidak memiliki hubungan yang relevan dengan negara lain.
- g. Pastikan akses penuh ke perawatan kesehatan seksual dan reproduksi berkualitas, termasuk perawatan prakelahiran dan perawatan obstetrik darurat. Ini termasuk memastikan bahwa layanan tersebut tersedia dan dapat diakses oleh penduduk Rohingya dan mencabut pembatasan perjalanan dan pergerakan.
- h. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan menyediakan sarana untuk memungkinkan perempuan korban dan keluarga mereka bersedia kembali ke rumah asalnya untuk kembali dengan aman dan bermartabat, dan mengambil tindakan yang efektif dan memadai untuk membangun kembali rumah dan infrastruktur dasar yang hancur.
- i. Memfasilitasi reintegrasi aman korban perempuan dan keluarga mereka. Upaya khusus harus dilakukan untuk memastikan partisipasi penuh dari para korban yang kembali dan keluarga mereka dalam perencanaan dan pengelolaan program pemukiman kembali, reintegrasi, dan rehabilitasi. Myanmar memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu para korban yang kembali dan keluarga mereka untuk memulihkan, sedapat mungkin, harta benda dan harta milik mereka yang mereka

tinggalkan atau dirampas. Ketika pemulihan properti dan harta benda semacam itu tidak memungkinkan, pihak yang berwenang harus menyediakan atau membantu orang-orang ini untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai atau bentuk lain dari reparasi yang adil.

- j. Mencabut empat apa yang disebut undang-undang ras dan perlindungan agama, yang diskriminatif dan melanggar hak-hak minoritas agama dan perempuan.
- k. Pastikan bahwa rancangan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan Hukum termasuk langkah-langkah untuk akuntabilitas untuk kekerasan seksual, khususnya pelanggaran terkait konflik, dengan ketentuan untuk pelaku militer untuk diadili di pengadilan sipil. Mempublikasikan rancangan undang-undang untuk meminta masukan dari semua masyarakat sipil sebelum pengaruhnya di parlemen.

Di dalam peran ini Human Rights berhasil memberikan dampak yaitu berhasil menekan dewan HAM PBB untuk mengeluarkan sebuah resolusi untuk membentuk misi pencari fakta internasional yang independen dengan mandat menyelidiki dugaan-dugaan pelanggaran HAM terbaru di Burma, khususnya di Negara Bagian Rakhine (Human Rights Watch, 2017).

Di dalam menjalankan tugasnya untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar tentunya bukan perkara mudah. Banyak sekali hambatan serta tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi-organisasi kemanusiaan yang ingin membantu mengatasi dan menghentikan konflik yang sedang terjadi di Myanmar tersebut. Salah satu organisasi kemanusiaan yang ikut serta dalam menangani krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Myanmar adalah Human Rights Watch. Di dalam menjalankan tugas dan perannya, Human Rights Watch tidak mungkin dapat dengan mudah mengatasi masalah-masalah yang ada di Myanmar, tentunya mereka juga memiliki dan menghadapi hambatan serta

tantangan di dalam menjalankan perannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

- 1) Pemerintah Myanmar tidak memberikan izin serta membatasi pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh wartawan dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Sehingga tidak mudah bagi Human Rights Watch untuk melakukan penyelidikan serta pemantauan langsung di wilayah konflik di Myanmar (Human Rights Watch, 2016). Pembatasan ini dilakukan karena Wakil Menteri Pertahanan Myanmar, Myint Nwe, meminta masyarakat dunia memberikan pemerintahnya ruang dan waktu untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Muslim Rohingya di negaranya (Dessthanja Suastha, 2017).
- 2) Human Rights Watch mengalami kesulitan saat ingin memberikan bantuan berupa makanan, minuman, obat-obatan dan lain sebagainya kepada etnis Rohingya. Hal ini dikarenakan pemerintah Myanmar juga turut serta memblokir bantuan yang diberikan dari berbagai Negara kepada etnis Rohingya sehingga banyak dari rakyat Rohingya yang mengalami kelaparan hebat dan tidak sedikit dari mereka juga mengalami sakit keras. Pemblokiran bantuan juga akan sangat berdampak pada program gizi dan klinik kesehatan keliling yang melayani daerah tersebut, kata pekerja bantuan. Dengan kebebasan bergerak yang terbatas, orang yang sakit atau terluka tidak dapat mengakses rumah sakit utama di wilayah Maungdaw (Human Rights Watch, 2016).
- 3) Dicabutnya status kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar menjadi salah satu hambatan bagi HRW. Hal ini dikarenakan sulitnya dan terbatasnya ruang gerak yang dimiliki oleh etnis Rohingya serta dipersulitnya akses untuk bertemu dengan etnis Rohingya yang masih berada di wilayah Myanmar (Azhari Ramadhani, 2014). Bahkan dikarenakan tidak memiliki status kewarganegaraan, seringkali pengungsi Rohingya yang

tidak diterima ketika mengungsi di Negara lain, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki surat-surat dan tanda pengenal yang lengkap. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi organisasi-organisasi kemanusiaan seperti HRW untuk membantu mencarikan tempat untuk menampung mereka.

Walaupun memiliki beberapa hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh Human Rights Watch, namun mereka tetap berusaha untuk terus membantu etnis Rohingya. Meskipun dibatasi dalam hal mencari informasi-informasi mengenai konflik di Myanmar, namun Human Rights Watch tidak menyerah, mereka memasang satelit untuk memantau apa yang sedang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya sehingga Human Rights Watch dapat memperoleh informasi yang cukup akurat dari kamera satelit tersebut. Selain itu Human Rights Watch juga mengunjungi beberapa pengungsi yang sudah berhasil keluar dari Myanmar untuk dimintai keterangan mengenai konflik yang sedang mereka alami.

Di dalam upayanya menyelesaikan kasus kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, Human Rights Watch memiliki ciri khas tersendiri. Di dalam kasus ini, Human Rights Watch lebih memfokuskan dalam memberikan informasi-informasi terkini dan akurat seputar konflik di Rohingya tersebut, bahkan Human Rights Watch telah melakukan sekitar kurang lebih 25 tahun dalam melakukan penelitian di Myanmar (HRW, 2018). Oleh karena itu Human Rights Watch di dalam kasus ini sangat khas akan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya, informasi yang diberikan oleh HRW ini pula selalu dijadikan sumber bagi media-media lain.